



**PERAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA CINGAMBUL KECAMATAN CINGAMBUL
KABUPATEN MAJALENGKA**

Diding Bajuri¹, Ujang Permana²

¹Universitas Majalengka

²Universitas YPIB Majalengka

[¹didingbajuri@unma.ac.id](mailto:didingbajuri@unma.ac.id) [²ujangpermana1305@gmail.com](mailto:ujangpermana1305@gmail.com)

ABSTRACT

This research is based on the existence of problems, namely in the Role of the Village Financial System (Siskeudes) in the Management of Village Funds in Cingambul Village, Cingambul District, Majalengka Regency, it is still not optimal and effective, based on observations of these symptoms, it is suspected that the implementation of the village financial system (Siskeudes) has not been fully implemented in accordance with the prevailing Regulation of the Minister of Home Affairs.

Given these problems, the authors are interested in conducting research whose results will be set forth in the form of a thesis entitled "ROLE OF THE VILLAGE FINANCIAL SYSTEM (SISKEUDES) IN MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS IN CINGAMBUL VILLAGE, CINGAMBUL DISTRICT, MAJALENGKA REGENCY".

In the collection technique using descriptive method with a qualitative approach and accompanied by data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the research on the role of the village financial system (Siskeudes) in managing village funds in Cingambul Village, Cngambul District, Majalengka Regency by using the theory of system characteristics with a nine-dimensional approach with twelve indicators, namely having components, having boundaries, having an environment, having links/interfaces, having processing, having outputs, having goals and objectives, having control, having feedback (Edhy Sutanta) is the lack of cooperation in the village financial system (Siskeudes), there are technical and non-technical constraints on the application of the village financial system in managing village funds, there are still complaints from village apparatus in the village financial system (Siskeudes).



PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD (berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014), seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang desa juga memberi

jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 lalu sudah mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa. Dengan adanya kucuran dana sebesar 10% dari APBN, sehingga sangat membutuhkan akuntabilitas dan transparansi untuk menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Masyarakat menjadi bagian langsung dari proses tersebut pada lingkup tertentu. Keterlibatannya diharapkan dapat



memperkuat kemungkinan masuknya agenda-agenda penting masyarakat berbasis pada data yang dibangun secara kolektif. Keterlibatan masyarakat merupakan pendekatan apresiatif dalam penyelenggaraan pelayanan di tingkat desa. Pengelolaan informasi akan memanfaatkan pendekatan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Website desa sebagai pendekatan utama dalam melaksanakan transparansi akan menjadi pintu bagi masyarakat untuk mengakses informasi tanpa harus hadir secara fisik ke kantor desa. Jika pelaksanaan tersebut berhasil diterapkan, maka kita masih punya harapan, bahwa pembangunan berdasarkan partisipasi demi mencapai cita-cita kesejahteraan bersama akan mampu diwujudkan. Keterbukaan pengelolaan Dana Desa akan menghindarkan pejabat publik dari berbagai upaya penyimpangan. Jadi, transparansi atau keterbukaan bukanlah ancaman, tetapi justru menjadi pemicu bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali atau tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang. Fitur-fitur

yang ada dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) diharapkan nantinya dapat membantu kerja dari aparat desa itu sendiri, sehingga kinerja dari aparat desa semakin membaik dan penggunaan dari sistem tersebut dapat lebih efektif. Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif akan berdampak negatif pada kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat. Mutu pelayanan bagi masyarakat perlu ditingkatkan karena hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai organisasi sektor publik. Sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat, semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengembangan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes)



mengharapkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan. Perbedaan yang mendasar antara sistem lama atau manual dengan sistem dengan sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu jika pada sistem manual masih terpisah-pisah dalam pelaporannya. Sedangkan untuk sistem yang baru (Siskeudes) dapat dilakukan dengan sekali kerja sudah banyak laporan yang muncul, tetapi tetap dalam penginputannya juga dilakukan beberapa kali.

Karena dasar-dasar dalam memasukan data ke sistem perlu menggunakan secara manual, untuk menanggulangi kesalahan yang akan terjadi. Data-data yang di input dalam Siskeudes yaitu:

1. Profil Desa
1. Penganggaran
2. Penatausahaan
3. Laporan Keuangan Desa

Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) ini tentu memiliki kelebihan atau kelemahan. Adapun kelebihan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yaitu:

- a. Sesuai peraturan
- b. Memudahkan tata kelola keuangan desa
- c. Kemudahan penggunaan aplikasi
- d. Dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (Built-in Internal Control)
- e. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi

Disamping kelebihan tersebut, kelemahan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga aparatur desa sulit untuk

mengaplikasikannya, selain itu kurangnya pelatihan penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa di desa Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, merupakan penelitian non hipotesis, sehingga langkah awal penelitian tidak merumuskan hipotesis, karena penulis tidak menguji hipotesis, namun memaparkan temuan topik penelitian di lapangan dan mencari jawaban atau eksplorasi dari masalah penelitian yang ditemukan.

Dalam Penelitian ini mengumpulkan dua jenis data, yaitu data primer dan skunder yang bersifat kualitatif, diantaranya:

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun nara sumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui laporan-laporan / buku buku / catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses Sistem Keuangan Desa serta dokumen-dokumen, meliputi pengelolaan Dana Desa, APBDes, monografi Desa, kondisi sarana dan prasarana, dan lainlain.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam Penelitian Laporan Praktek ini memiliki tujuan agar dapat menjangking data-data yang valid pada Penelitian Laporan Praktek . Peneliti Laporan Praktek



Kepamongprajaan akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, Peneliti akan menganalisis beberapa data berupa referensi berdasarkan buku yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi acuan Peneliti serta diktat perkuliahan, artikel, buku-buku dan dokumentasi lainnya untuk dikumpulkan sebagai bahan acuan yang dijadikan landasan dalam menyusun Penelitian Laporan Praktek sistem keuangan desa (Siskeudes).

2) Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu teknik pengumpulan data primer yang diperoleh melalui peninjauan lapangan di obyek penelitian yaitu di Desa Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, dengan beberapa teknik sebagai berikut:

(1) Observasi

Teknik pengumpulan data pada Penelitian Laporan Praktek ini menggunakan Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke Kantor Desa Cingambul guna memperoleh gambaran yang tepat mengenai masalah dan hambatan yang dihadapi serta upaya perbaikan yang diperlukan, dengan catatan Peneliti tidak ikut serta dalam proses kegiatan sehari-hari objek yang diteliti.

(2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila Peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, Peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan mengambil informan 7 orang untuk diwawancara diantaranya kepala desa, kaur keuangan desa, ketua badan permusyawaratan desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat, ketua karang taruna, ketua badan usaha milik desa, dan ketua pembina kesejahteraan keluarga. Peneliti akan menggunakan wawancara tak berstruktur karena Peneliti hanya mengumpulkan data yang berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dengan membawa alat wawancara seperti : buku catatan, tape recorder, dan kamera.

Informan Penelitian, Penentuan informan dalam Penelitian Laporan Praktek ini didasarkan atas pihak-pihak yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data, disamping itu penentuannya pun didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Penentuan informan dalam Penelitian Laporan Praktek ini menggunakan teknik purposive, dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, mengenai sumber informasi ada dua informan yaitu informan kunci dan informan pendukung, maka Peneliti menentukan informan dalam Penelitian Laporan Praktek ini sebagai berikut:

1. Informan Aparatur Desa Cingambul :

- 1) Kepala Desa Cingambul. Karena beliau yang mengetahui informasi dan penanggungjawab peran sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Cingambul.



- 2) Kaur Keuangan Desa Cingambul. Karena beliau mengetahui informasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Cingambul.
2. Informan Lembaga Desa Cingambul :
- 1) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena beliau adalah perwakilan dari lembaga desa yang mengetahui informasi tentang program desa khususnya Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Cingambul.
 - 2) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Karena beliau adalah perwakilan dari lembaga desa yang mengetahui informasi tentang program desa dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Cingambul.
 - 3) Ketua Karang Taruna. Karena beliau adalah perwakilan dari lembaga desa yang mengetahui informasi tentang program desa dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Cingambul.
 - 4) Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Karena beliau adalah perwakilan dari lembaga desa yang mengetahui informasi tentang program desa dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Cingambul.
 - 5) Ketua Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK). Karena beliau adalah perwakilan dari lembaga desa yang mengetahui informasi tentang program desa dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Cingambul.

Dokumentasi, Dokumentasi yang Peneliti lakukan yakni pengumpulan data dari catatan-catatan tertulis, dari hasil tulisan-tulisan pada mata kuliah yang Peneliti dapatkan, atau tentang berbagai peristiwa pada waktu yang lalu dalam permasalahan-permasalahan mengenai

sistem keuangan desa dalam pengelolaan dana desa. Sebagai tahapan awal pengumpulan informasi melalui internet pada Penelitian Laporan Praktek ini, di mana masing-masing sampel sudah memiliki dokumentasi data yang terbuka pada halaman website padamu negeri indonesia. Jadi sebelum melakukan Penelitian sebelumnya Peneliti sudah dapat memperoleh berbagai informasi menyangkut data yang berhubungan dengan peran sistem keuangan desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka

Proses Penggunaan Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka. Penerapan Sistem Keuangan Desa sangat penting adanya karena membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien. Di terapkan pada tahun 2017 proses penggunaan Sistem Keuangan Desa Cingambul sudah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai prosedur. Semua laporan keuangan yang sudah selesai akan melewati proses penginputan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Dalam proses pelaksanaannya, sebelum menginput data ke dalam aplikasi siskeudes, desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang telah disesuaikan sebelumnya dengan yang tertera dalam sistem. RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang akan diinput tersebut



merupakan rancangan yang akan digunakan untuk tahun berikutnya.

Dalam penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) Desa Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka dapat dilihat dari hasil penelitian wawancara dengan para informan dengan menggunakan 10 dimensi dan di dalamnya terdapat 12 indikator yaitu diantaranya :

1. Mempunyai komponen

a. Sistem dapat berupa nyata atau abstrak

Sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi serta dapat berupa nyata atau abstrak, dapat dilihat dari hasil wawancara sejauh mana sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa di Desa Cingambul yaitu sebagai berikut :

“Pelaksanaan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku dan dijalankan dengan baik”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cingambul)

Pendapat Kepala Desa Cingambul Ditambahkan oleh Kaur Keuangan Desa Cingambul menyatakan bahwa :

“Dalam Pelaksanaan sistem keuangan desa (Siskeudes) harus sesuai dengan APBDes yang telah disusun dan ditentukan”.

Kemudian menurut Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua Karang Taruna Desa Cingambul berpendapat lain bahwa :

“Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Cingambul masih belum berjalan secara efektif dan masih terkendala secara teknis”.

Sedangkan pernyataan dari Ketua BPD, Ketua LPM, ketua Karang Taruna

disanggah oleh Ketua BUMDes yang berpendapat bahwa :

“Bahwa penerapan sistem keuangan desa (Sikeudes) di Desa Cingambul sejauh ini berjalan efektif dan terkendali”.

Dari hasil wawancara diatas dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan/penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka secara keseluruhan berjalan secara optimal masih terkendala dengan teknis.

b. Komponen sistem disebut sebagai subsistem, hal, kejadian yang saling terlibat di dalam sistem

Komponen Sistem (*Component*) yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerjasama membentuk suatu kesatuan yaitu dimana sistem keuangan desa (Siskeudes) saling berkaitan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cingambul dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut :

“Sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa di Desa Cingambul saling berkaitan karena mengacu pada peraturan dan sistem yang berlaku”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cingambul)

Sedangkan menurut Kaur Keuangan Desa Cingambul menyatakan bahwa :

“peran sistem keuangan desa (Siskeudes) saling berkaitan dalam pengelolaan dana desa karena komponen ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kepentingan desa”.

Kemudian pernyataan Kaur Keuangan Desa Cingambul ditambahkan



oleh Ketua BPD Desa Cingambul yang menyatakan bahwa :

“Bertujuan untuk kepentingan Desa Cingambul dan masyarakat dalam hal pembangunan, kemasyarakatan, dan sebagainya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan dana desa di Desa Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka saling berkaitan dan berjalan efektif sesuai peraturan yang berlaku.

2. Mempunyai batas

a. Batas sistem akan memberikan scope tinjauan terhadap sistem

Batasan Sistem (Boundary) Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya serta memberikan scope tinjauan terhadap sistem, batasan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa di Desa Cingambul dapat dilihat dari uraian wawancara sebagai berikut :

“Batasan sistem keuangan desa di kelola dengan baik, untuk penggunaannya di alokasikan sesuai dengan sistem peraturan yang ada dan juga di laporkan di kecamatan mengenai keuangan desa”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cingambul)

Pernyataan Kepala Desa Cingambul ditambahkan oleh Kaur Keuangan dan Ketua LPM serta Ketua BUMDes menyatakan bahwa :

“Mempunyai batasan sistem yang jelas dan dikelola dengan baik”.

Kemudian Ketua BPD Desa Cingambul berpendapat lain bahwa :

“Dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) tidak mempunyai batasan yang jelas”.

Dari hasil wawancara di atas bahwa batasan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa di Desa Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka belum mempunyai batasan sistem yang jelas .

3. Mempunyai lingkungan

a. Lingkungan sistem bersifat menguntungkan dan merugikan

Lingkungan sistem ini dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Lingkungan yang menguntungkan harus dipelihara dan dijaga agar tidak hilang pengaruhnya, sedangkan lingkungan yang merugikan harus dimusnahkan dikendalikan agar tidak mengganggu operasi sistem. Dalam penerapan lingkungan sistem keuangan desa (Siskeudes) dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) harus sesuai dengan lingkungan sistem yang baik karena dalam penerapan sistem keuangan desa mempunyai peran dalam pengelolaan dana desa”. (wawancara dengan Kepala Desa Cingambul)

Sedangkan Kaur Keuangan Desa Cingambul berpendapat lain bahwa :

“Bahwa penerapan Sistem keuangan desa (Siskeudes) tergantung pada Lingkungan sekitar sistem dan pengelolaannya juga harus tertata kelola bertujuan agar sistem keuangan desa yang baik”.



Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan lingkungan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Cingambul masih terkendala dan belum efektif.

4. Mempunyai penghubung/antar muka

a. Mempunyai tugas menjembatani hubungan antar komponen dengan sistem

Penghubung atau antar muka merupakan komponen sistem, yaitu segala sesuatu yang bertugas menjembatani hubungan antar komponen dalam sistem maksudnya adalah sejauh mana tugas dalam menjalankan sistem keuangan desa Cingambul yang dilakukan oleh para pelaksana.

Dapat dilihat dari hasil wawancara para informan sebagai berikut

“Sejauh ini tugas dalam menjalankan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Cingambul berjalan efektif dan sesuai tugasnya masing-masing”. (hasil wawancara Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Cingambul berpendapat sama)

Sedangkan Ketua BPD, Ketua LPM, dan Ketua Karang Taruna berpendapat bahwa :

“Tugasnya masih belum jelas dalam menjalankan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Cingambul”.

Kemudian jawaban dari Kepala Desa dan kaur Keuangan Desa Cingambul ditambahkan oleh Ketua Bumdes menyatakan bahwa :

“Tugas dalam menjalankan sistem keuangan desa (Siskeudes) cukup jelas”.

b. Saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam rangka menjalankan fungsi masing-masing komponen

Penghubung atau antar muka merupakan sarana yang memungkinkan setiap komponen saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam rangka menjalankan fungsi masing-masing komponen, serta saling kerjasama yang dilakukan dalam sistem keuangan desa (Siskeudes). Dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Kerjasama yang dilakukan dalam menjalankan sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Cingambul cukup baik”. (Hasil wawancara dengan kepala Desa Cingambul)

Pernyataan Kepala Desa ditambahkan oleh Sekertaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua LPM menyatakan bahwa :

“kerjasama yang dilakukan dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Cingambul sesuai arahan dan tersusun baik”.

Sedangkan dan Ketua Karang Taruna berpendapat lain bahwa :

“kerjasama yang dilakukan belum sepenuhnya dan masih terkendala dalam sistem keuangan desa (Siskeudes)”.

Berdasarkan hasil wawancara sejauh mana kerjasama yang dilakukan dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) belum seluruhnya optimal dan masih banyak kendala.

5. Mempunyai pengolahan

a. Pengolahan berupa program aplikasi



Pengolahan merupakan komponen sistem yang mempunyai peran utama mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna bagi para pemakainya. Dalam Sistem Informasi Manajemen, pengolahan adalah berupa program aplikasi komputer yang dikembangkan untuk keperluan khusus serta dalam pengaplikasian sistem keuangan desa (Siskeudes) terdapat kendala teknis maupun non teknis. Dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Dalam pengaplikasian sistem keuangan desa di Desa Cingambul masih terdapat kendala diantaranya perlunya bimbingan dan pelatihan”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cingambul)

Sedangkan menurut Kaur Keuangan menyatakan bahwa :

“Lemahnya kapasitas personal desa dalam mengaplikasikan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Cingambul karena SDM yang belum memadai”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam pengaplikasian sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Cingambul masih terkendala dan belum efektif.

6. Mempunyai pengeluaran

a. Bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan

Keluaran merupakan komponen sistem yang berupa berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan. Dalam Sistem Informasi Manajemen, keluaran adalah informasi yang dihasilkan oleh program

aplikasi dalam sistem keuangan desa (Siskeudes). Dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Sejauh ini yang dihasilkan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa di desa Cingambul yaitu berupa data yang tujuannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cingambul dan kaur keuangan yang berpenapat sama)

Sedangkan menurut Katua BPD dan Ketua LPM menambahkan bahwa :

“yang dihasilkan dari sistem keuangan desa dalam pengelolaan dana desa sejauh ini sudah terbukti dan berjalan efektif”

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas sejauh mana yang dihasilkan sistem keuangan desa dalam pengelolaan dana desa sudah berjalan efektif dan hasilnya terbukti.

7. Mempunyai sasaran dan tujuan

a. Mempunyai tahapan tertentu

Setiap komponen dalam sistem perlu dijaga agar saling bekerja sama dengan harapan agar mampu mencapai sasaran dan tujuan sistem. Sasaran berbeda dengan tujuan. Sasaran sistem adalah apa yang ingin dicapai oleh sistem untuk jangka waktu yang relatif pendek. Sedangkan tujuan merupakan kondisi atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh sistem untuk jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini, sasaran merupakan hasil pada setiap tahap tertentu yang mendukung upaya pencapaian tujuan sistem keuangan desa (Siskeudes).

Dapat dilihat hasil wawancara sejauh mana peran dalam pencapaian



tujuan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Cingambul sebagai berikut :

“sejauh ini peran saya telah berkontribusi dan memberikan pengarahan sesuai arahan dari pusat”. (hasil wawancara dengan Kepala Desa)

Sedangkan menurut Kaur Keuangan mengatakan bahwa :

“Peran dan tanggungjawab dalam pencapaian tujuan sistem keuangan desa (Siskeudes) sudah dilaksanakan dengan baik”.

Kemudian menurut pendapat Ketua BPD dan Ketua BUMDes Desa Cingambul menyatakan bahwa :

“Peran dalam pencapaian sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Cingambul sejauh ini sudah dilakukan secara maksimal”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sejauh ini peran yang dilakukan dalam pencapaian tujuan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Cingambul sudah dilakukan perannya secara maksimal.

8. Mempunyai kendali

a. Mempunyai peranan utama dalam menjaga sistem

Setiap komponen dalam sistem perlu selalu dijaga agar tetap bekerja sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Hal ini bisa dilakukan jika ada bagian yang berperan menjaganya, yaitu bagian kendali. Bagian kendali mempunyai peran utama menjaga agar proses dalam sistem dapat berlangsung normal dan peran pengelolaan sistem keuangan desa (Siskeudes). Dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Pengelolaan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Cingambul sejauh ini terkelola dengan baik”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cingambul)

Pernyataan Kepala Desa ditambahkan oleh Kaur Keuangan dan Ketua BPD Desa Cingambul mengatakan bahwa :

“Dan dalam pengelolaan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Cingambul dikelola sesuai prosedur dari pusat”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sejauh mana peran dalam mengelola sistem keuangan desa (Siskeudes) berjalan optimal dan baik.

b. Bersifat secara terprogram

Dalam sistem keuangan desa (Siskeudes), kendali dapat berupa validasi masukan, validasi proses, maupun validasi keluaran yang dapat dirancang dan dikembangkan secara terprogram sesuai peraturan yang berlaku. Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para informan yang ditentukan di Desa Cingambul sebagai berikut :

“Sesuai peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang pengelolaan keuangan desa”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Cingambul yang pendapatnya sama)

Sedangkan Menurut Ketua BPD, Ketua PKK dan Ketua LPM Desa Cingambul mengatakan bahwa :

“Sesuai Peraturan yang berlaku tetapi penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam



pengelolaan dana desa masih belum sama dengan apa yang dituangkan diperaturan yang ada”.

9. Mempunyai umpan balik

a. Mempunyai kendali dalam mengecek sistem dan mencegah terjadinya penyimpangan proses

Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali (*control*) sistem untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan pengembaliannya ke dalam kondisi normal. Sejauh mana kendali yang dijalankan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa di Desa Cingambul dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Kendali yang dilakukan dalam sistem keuangan desa sejauh ini terkendali dan dijalankan dengan baik dalam pengelolaan dana desa di Desa Cingambul”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cingambul)

Sedangkan pernyataan dari Kepala Desa ditambahkan oleh Ketua LPM dan Ketua BUMDes mengatakan bahwa :

“Sejauh ini sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa terkendali dan dijalankan sesuai peraturan yang berlaku”.

Kemudian menurut Ketua BPD Desa Cingambul mengatakan bahwa :

“Belum semuanya sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa di Desa Cingambul terkendali karena terdapat masalah atau gangguan teknis maupun non teknis dalam penerapannya”.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan di atas bahwa peran sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa di Desa Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka optimal serta efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur kerja sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Cingambul sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karakteristik sistem.
2. Sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa di desa Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka masih terdapat kendala teknis maupun non teknis.
3. Kerja sama dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa di Desa Cingambul belum terjalin dengan baik dikarenakan faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung : Cv Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sutanta, Edhy. 2003. *Sistem Informasi Manajemen : Konsep & Pengembangannya*. Bandung. Lingga Jaya.



Syafiie, Kencana Inu. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. PT Rineka Cipta.

Wahyuni, Arie, dkk. *Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa*. Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa.